



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG



2025 2029



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JL. GUNA BARU TRANS RANGKANG TELP. (0562) 441581
BENGKAYANG

JALAN GUNA BARU TRANS
RANGKANG, KELURAHAN SEBALO,
KECAMATAN BENGKAYANG,
KABUPATEN BENGKAYANG
79211



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

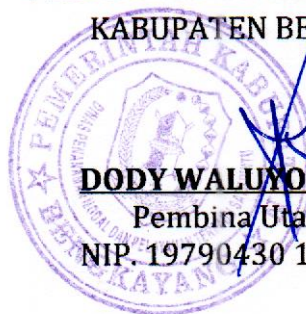
Renstra ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Bengkayang dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Dokumen ini diharapkan mampu menjadi instrumen perencanaan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bengkayang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan visi pembangunan daerah, khususnya dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang.

Bengkayang, 27 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG



DODY WALUYO, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790430 199712 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II.....	8
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	8
2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	9
2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional.....	10
2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	12
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	13
2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Bengkayang	13
2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Bengkayang.....	14
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.1.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Bengkayang.....	16
2.1.3.2 Hasil Evaluasi Capaian Anggaran.....	19
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	22
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.....	24
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	25
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.2.2 Isu Strategis	26
2.2.2.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	26
2.2.2.2 Telaahan Renstra Provinsi	28
2.2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	30
2.2.2.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	31
2.2.2.5 Isu/Kesenjangan Gender.....	35
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....	37
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	37



3.2	Strategi Perangkat Daerah	42
3.3	Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	44
3.4	Manajemen Risiko	49
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		52
4.1	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah	52
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	105
BAB V PENUTUP		109



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah SDM berdasarkan Jabatan.....	13
Tabel 2.2	Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	14
Tabel 2.3	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang	14
Tabel 2.4	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bengkayang.....	15
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang	17
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang.....	20
Tabel 2.7	Kelompok Sasaran Layanan.....	22
Tabel 2.8	Mitra Perangkat Daerah	23
Tabel 2.9	Dukungan BUMD.....	24
Tabel 2.10	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang	25
Tabel 2.11	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L.....	27
Tabel 2.12	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	29
Tabel 2.13	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang ditinjau dari implikasi RTRW.....	30
Tabel 2.14	Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis.....	32
Tabel 2.15	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	35
Tabel 3.1	Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	41
Tabel 3.2	Perumusan Strategi	43
Tabel 3.3	Penentuan Strategi	43
Tabel 3.4	Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang	45
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	46
Tabel 3.6	Matriks Risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang.....	50



Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD.....	54
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang	86
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	103
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	105
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	106



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang	12
Gambar 3.1 <i>Cascading</i> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang	40
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra PD	53



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis, yang selanjutnya disingkat Renstra, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 29, Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima (5) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang perlu disusun sebagai pedoman perencanaan jangka menengah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang memastikan konsistensi arah pembangunan serta sinkronisasi antara rencana pembangunan perangkat daerah dan daerah. Dengan demikian, perangkat daerah dapat lebih fokus, efisien, dan efektif dalam mengelola sumber daya serta mencapai hasil yang terukur. Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang menjadi dasar evaluasi kinerja dan akuntabilitas yang mendukung penerapan sistem pemerintahan yang transparan. Penyusunannya juga melibatkan partisipasi pemangku kepentingan, sehingga memperkuat legitimasi dan kualitas perencanaan pembangunan.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Bengkayang berfungsi untuk menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bengkayang.

Pedoman penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal (ranwal) Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang menjabarkan keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan spasial dan aspasial. Penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta memperhatikan dokumen seperti RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh karena itu, konsistensi dan keterpaduan antar dokumen ini sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan terarah.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3)



24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 2);
25. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 54);
26. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 90 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan selama periode lima tahun. Renstra disusun untuk memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan yang dilakukan oleh perangkat daerah berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah.

Adapun tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 antara lain:

- a. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih untuk periode 5 Tahun (2025-2029) kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode 2025- 2029.
- b. Menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan tantangan pembangunan.
- c. Menyusun arah kebijakan sektoral yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan.
- d. Menjabarkan rencana kerja perangkat daerah ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang konkret, disertai indikator kinerja dan target capaian yang jelas.
- e. Menyusun rencana pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.



1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai dasar dalam penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah dengan memuat beberapa subbab sebagai berikut:

- 1.1 Pendahuluan;
- 1.2 Dasar Hukum penyusunan;
- 1.3 Maksud dan tujuan; dan
- 1.4 Sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada Bab ini Bab ini memuat informasi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan;
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan;
 - 2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah; dan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 2.2.2 Isu Strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Pada bab ini termuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah, yang terdiri atas:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah;
- 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
- 3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Bab ini memuat rincian program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggara bidang urusan, sebagai berikut:

- 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat daerah; dan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V Penutup



Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 90 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal serta di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- c) pelaksanaan evaluasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- d) pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- e) pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 90 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kebijakan Bupati.



2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam hal mempersiapkan perangkat pelayanan, petunjuk teknis administrasi, pengkoordinasian perencanaan, program, pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, surat menyurat, perjalanan dinas dan protokoler,
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
2. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
3. Penyelenggaraan dan pengelolaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
4. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan ketatausahaan keuangan dan pembinaan organisasi di bidang kesekretariat;
5. Pelaksanaan pembinaan kebendaharawan dan PPTK di lingkungan Dinas;
6. Pelaksanaa evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
8. Pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas;
9. Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan SKPD Dinas;
10. Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas;
11. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat membawahi;

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Tugas pokok dan Fungsi Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian :

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Urusan surat menyurat, kearsipan, sinventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas, kerjasama, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan tatalaksana.



Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
2. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
3. Pelaksanaan penata usahaan dan inventarisasi barang;
4. Pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu hubungan masyarakat dan keprotokolan;
5. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
6. Penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
7. Penyiapan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
8. Penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa / penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
9. Penyiapan bahan telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan tatalaksana;
10. Penyiapan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi daftar urut kepangkatan, dokumentasi berkas pegawai dan rekapitulasi absensi;
11. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
12. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pegawai ASN dalam jenjang Jabatan Fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu;

- a. Kelompok jabatan Fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan melaksanakan tugas dan fungsi jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis Fungsional;
 1. Kelompok jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
 2. Dalam masa transisi, dapat ditetapkan koordinator dan / atau Sub koordinator kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi

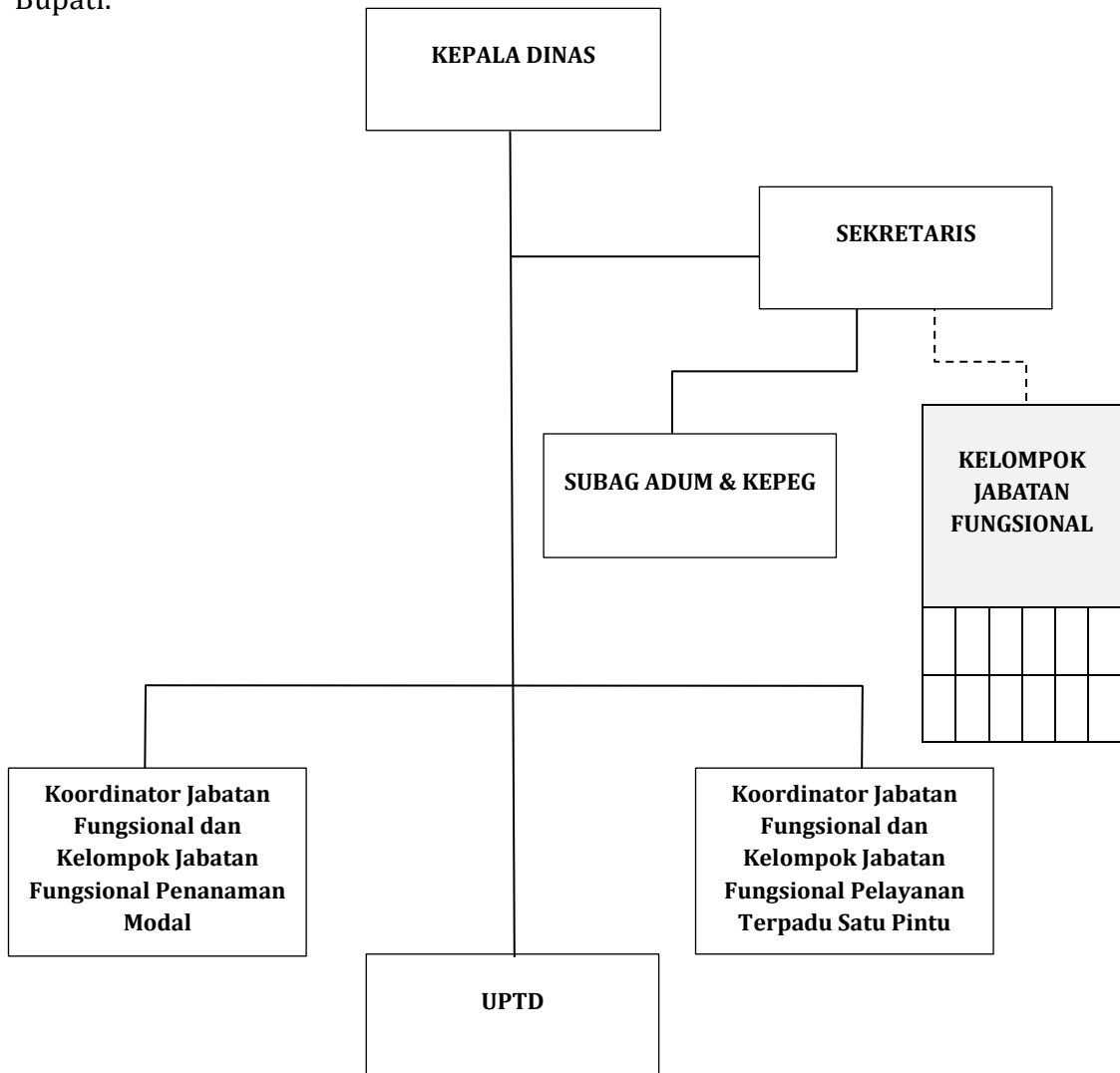


- tertentu yang di pimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk.
3. Penetapan, rician tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan /Sub Koordinator kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi ditetapkan.
 5. Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 6. Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian /inpasing berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannyaketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.
 4. Penetapan Kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.

5. Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas JF penyetaraan jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah kecamatan, yang ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang

Sumber: Perbub Bengkayang Nomor 90 Tahun 2022

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang

Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang sebanyak 37 Orang, yang terdiri dari:

Tabel 2.1 Jumlah SDM berdasarkan Jabatan

- **Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	0	3	3
3	Golongan III	13	7	20
4	Golongan IV	3	1	4
Jumlah		16	11	27

Sumber: Bezetting dan DUK DPMPTSP Agustus 2025

- **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	0	1
2	Golongan VII	0	4	4
3	Golongan IX	1	4	5
Jumlah		2	8	10

Sumber: Bezetting dan DUK DPMPTSP Agustus 2025

Pada bulan Juni 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang memiliki tambahan Calon Pegawai Negeri (CPNS) sipil sebanyak 6 orang yang semula 21 orang menjadi 27 orang.

Pada bulan Juli 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang mengangkat yang semula



sebagai pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 10 orang.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang sebanyak 37 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 2.2 Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	0	0	1	0	1
2	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	2	2	0	0	4
4	D3	2	1	0	4	7
5	S1	9	7	1	4	21
6	S2	3	1	0	0	4
Jumlah						37

Sumber: Bezetting dan DUK DPMPTSP Agustus 2025

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung Kantor	1		1
2	Kendaraan Roda 4	1		1
3	Kendaraan Roda 2	8		8
4	Komputer	29		29
5	Laptop	14		14
6	Printer	34		34
7	Camera Digital	2		2
8	Kursi Lipat	5		5
9	Kursi Tamu	2		2
10	Kursi Rapat	22		22
11	Kursi Ruang Tunggu	1		1
12	Kursi Putar	10		10
13	Meja Kerja	31		31
14	Meja Rapat	5		5
15	Meja Resepsionis	6		6



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
16	Lemari	5		5
17	Filing Kabinet	11		11
18	Rak	7		7
19	Telepon	1		1
20	Lemari Besi/Brankas	1		1
21	Mesin Tik		1	1
22	Projector	2		2
23	Layar Projector	1		1
24	Sound System	1		1
25	Server	1		1
26	AC	18		18
27	Scanner	1		1
28	Mesin Penghancur Kertas	1		1
29	Faksimile	1		1
30	Fasilitas Internet	1		1
31	UPS	8	2	10
32	Stabilizer	6	1	7
33	Mesin Rumput	3		3
34	Kamera CCTV (Set)	1		1
35	Televisi LED	3		3
36	GPS	12		12
37	Tablet	1		1
38	Lemari Es	2		2
39	Sound System	4		4
40	Audio Mixing Console	2		2
41	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	1		1
42	Modem	1		1

Sumber: Data Inventaris DPMPTSP Kab. Bengkayang 2025

Tabel 2.4 Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bengkayang

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Personal Computer (PC)	17		17
2	Printer	15		15
3	Mesin Antrian	1		1
4	Smart TV	1		1
5	Dispenser	1		1

Sumber: Data Inventaris DPMPTSP Kab. Bengkayang 2025

Secara keseluruhan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang memiliki sarana dan prasarana yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Meskipun demikian, diperlukan langkah evaluasi berkala dan peremajaan aset tertentu guna menjaga kualitas pelayanan tetap optimal, khususnya pada peralatan yang telah menunjukkan tanda-tanda kerusakan atau penurunan fungsi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang juga mengelola sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bengkayang. Secara umum, sarana dan



prasarana MPP dalam kondisi baik dan memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Ketersediaan infrastruktur yang memadai ini mendukung terciptanya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pengelolaan inventaris yang baik juga menunjukkan komitmen MPP dalam menjaga kualitas layanan melalui penyediaan fasilitas yang layak dan siap pakai.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang fokus program dan kegiatannya diarahkan pada sistem, prosedur dan mekanisme Kelompok Bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, antara lain :

1. Pengumpulan data dasar (database) dari berbagai peraturan perundangan terhadap aspek regulasi perizinan di daerah;
2. Pengumpulan data dasar (database) terhadap berbagai potensi baik pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan dari aspek pemerintah dan agama, ekonomi, tata ruang, infrastruktur serta sosial budaya;
3. Pengolahan arsip sehingga menjadi data informasi yang akurat, aktual dan dapat dipertanggungjawabkan terutama dalam menetapkan kebijakan;
4. Memaksimalkan fungsi dan peran media masa (elektronik, cetak) melalui kerjasama dan kemitraan dan mendukung arah kebijakan umum pemerintah Kabupaten Bengkayang, termasuk revitalisasi, simplikasi pelayanan perizinan di Kabupaten Bengkayang;
5. Melakukan Koordinasi lintas sektoral dengan lembaga-lembaga terkait dalam pemetaan dan pembinaan menyangkut kewenangan pelayanan, sehingga dapat dioperasionalkan seefektif dan seoptimal mungkin;
6. Meningkatkan peran dan fungsi promosi potensi daerah melalui berbagai media massa serta penyebarluasan informasi;
7. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk pelaksanaan pelayanan perizinan sebagai wujud pelaksanaan E-government.;
8. Penataan arsip guna untuk penyelamatan bahan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

Adapun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang

No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Meningkatnya investasi daerah/ Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)	-	-	-	2461,39	3115,67	3689,2	3975,45	958,9	763,54	425,699	792,36	38,95766	24,50645	11,53906	19,93133
2	Meningkatkan Kemitraan Pemerintah dengan Dunia Usaha/ Persentase Perusahaan yang melaksanakan CSR	-	-	-	N/A	50	60	70	N/A	82,06	47,22	34,88	N/A	164,12	78,7	49,82857
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan Aset Pemerintah / Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat	-	-	-	B (80,00)	B	B	B	82,83	84,15	85,48	85,54	103,5375	103,0244	103,0602	100,9322

Sumber: Renstra DPMPTSP Kab. Bengkayang 2021-2024



Permasalahan

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2021–2024, terdapat beberapa permasalahan utama:

- **Indikator Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)** mengalami gap signifikan antara target dan realisasi. Hal ini terjadi karena target Renstra masih mengacu pada target periode sebelumnya, yang saat itu ditopang oleh adanya proyek strategis nasional. Namun, proyek tersebut terhenti pada tahun 2018, sementara target terus meningkat tiap tahun sehingga realisasi capaian tidak sesuai dengan target.
- **Indikator Kemitraan Pemerintah dengan Dunia Usaha dalam CSR** menunjukkan ketidakstabilan capaian. Pada tahun 2021 capaian masih 0, tahun 2022 melampaui target dengan rasio 164,12%, namun tahun 2023–2024 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan belum konsistennya pelaksanaan dan pelaporan CSR oleh perusahaan.
- **Indikator Kualitas Pelayanan Publik (SKM)** relatif tercapai, namun masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi pelayanan agar nilai tetap meningkat, bukan sekadar stabil.

Peluang

Meskipun terdapat permasalahan, terdapat pula peluang yang bisa dimanfaatkan:

- Peningkatan investasi daerah masih berpotensi dicapai melalui promosi peluang usaha lokal, pemetaan potensi unggulan daerah, serta kerjasama lintas daerah maupun lintas sektor.
- Kemitraan CSR dapat terus ditingkatkan melalui penguatan regulasi dan kewajiban pelaporan CSR, sehingga keberlanjutan program dapat lebih terjamin.
- Kualitas pelayanan publik memiliki peluang terus ditingkatkan melalui digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan kapasitas SDM aparatur.

Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi dalam periode berikutnya adalah:

- Target yang tidak realistis akibat masih mengacu pada kondisi masa lalu (proyek strategis nasional) sehingga perlu adanya penyesuaian target yang lebih berbasis potensi aktual daerah.
- Minimnya investasi baru yang masuk ke daerah, sehingga perlu strategi lebih agresif dalam menarik investor melalui pemberian insentif, kemudahan perizinan, serta peningkatan citra daerah yang kondusif bagi investasi.



- Keterbatasan monitoring CSR yang menyebabkan capaian bersifat fluktuatif, sehingga diperlukan sistem evaluasi yang lebih ketat dan terintegrasi.
- Konsistensi peningkatan kualitas layanan publik, karena meskipun capaian SKM baik, tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses semakin tinggi.

2.1.3.2 Hasil Evaluasi Capaian Anggaran

Evaluasi capaian anggaran perangkat daerah disusun untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Melalui analisis terhadap realisasi anggaran dan *output* yang dihasilkan, evaluasi ini memberikan gambaran kinerja perangkat daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program yang lebih tepat sasaran di periode berikutnya.



Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke- (Rp)				Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)				Rata-Rata Pertumbuhan (Rp)	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BELANJA DAERAH	4.802.782.000	3.985.976.866	4.599.870.751	3.931.840.006	3.578.865.001	3.555.698.341	4.181.578.744	3.643.048.375	74,52	89,21	90,91	92,66	4.330.117.406	3.739.797.615
Belanja Tidak Langsung														
- Belanja Pegawai	2.790.106.621	2.353.784.483	2.682.581.999	2.520.387.036	2.178.574.010	2.185.715.262	2.643.724.132	2.400.829.642	78,08	92,86	98,55	95,26	2.586.715.035	2.352.210.762
Belanja Langsung														
- Belanja Barang dan Jasa	1.926.440.279	1.523.906.623	1.782.441.752	1.123.492.970	1.319.743.991	1.263.875.079	1.411.254.612	955.588.733	68,51	82,94	79,18	85,06	1.589.070.406	1.237.615.604
- Belanja Modal	86.235.100	108.285.760	134.847.000	287.960.000	80.547.000	106.108.000	126.600.000	286.630.000	93,40	97,99	93,88	99,54	154.331.965	149.971.250
Total	4.802.782.000	3.985.976.866	4.599.870.751	3.931.840.006	3.578.865.001	3.555.698.341	4.181.578.744	3.643.048.375	74,52	89,21	90,91	92,66	4.330.117.406	3.739.797.615

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah DPMPTSP Kab. Bengkayang 2021-2024

Berdasarkan Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2024, diperoleh beberapa poin analisis :

1. (90,91%), hingga 2024 (92,66%). Ini menandakan efektivitas penyerapan anggaran semakin baik.
2. Rasio realisasi belanja anggaran tinggi, khususnya 2022-2024 (92,86%-98,55%), menunjukkan belanja pegawai terkelola dengan baik dengan Rata-rata pertahun: anggaran Rp2,59 miliar, realisasi Rp2,35 miliar.
3. Realisasi anggaran belanja modal meningkat signifikan dari Rp80 juta (2021) menjadi Rp286 juta (2024) dengan Rasio realisasi sangat baik dan konsisten (93-99%).

Secara keseluruhan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang menunjukkan tren peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran. Hal ini tercermin dari rasio realisasi terhadap anggaran yang terus meningkat dari 2021 hingga 2024. Belanja pegawai relatif stabil dan terkelola dengan baik, sedangkan belanja barang dan jasa masih berfluktuasi sehingga memerlukan penguatan perencanaan. Sementara itu, belanja modal menunjukkan perkembangan positif dengan realisasi yang hampir sepenuhnya sesuai anggaran, khususnya di 2024. Dengan demikian, kinerja pengelolaan anggaran dapat dinilai cukup baik, meski tetap perlu optimalisasi terutama pada belanja langsung agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Selain temuan utama, terdapat catatan penting terkait belanja modal tahun 2024. Anggaran belanja modal sebesar Rp287 juta yang terealisasi hampir sepenuhnya (Rp286 juta atau 99,65%) digunakan untuk mendukung kebutuhan sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bengkayang. Hal ini sejalan dengan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang akan membuka MPP pada tahun 2025.

Pengalokasian belanja modal ini menunjukkan adanya fokus investasi jangka menengah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya melalui penyediaan fasilitas yang lebih representatif, modern, dan terintegrasi. Dengan adanya MPP Kabupaten Bengkayang, diharapkan pelayanan perizinan dan non-perizinan dapat lebih efisien, transparan, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Dengan demikian, belanja modal 2024 tidak hanya mendukung kebutuhan rutin perangkat daerah, tetapi juga berfungsi sebagai pondasi pembangunan kelembagaan pelayanan publik, yang dampaknya baru akan optimal dirasakan mulai tahun 2025 ketika MPP Kabupaten Bengkayang beroperasi penuh.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi kelompok sasaran pelayanan dilakukan berdasarkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan. Berikut ini adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari perangkat daerah selama periode perencanaan strategis:

Tabel 2.7 Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran	Uraian Kebutuhan/Harapan
1	Penanaman Modal	Fasilitasi dan Promosi Investasi	Investor asing (PMA) dan domestik (PMDN), pelaku usaha lokal	Mebutuhkan kepastian regulasi, insentif investasi, informasi peluang usaha, dan kemudahan proses perizinan agar tertarik menanamkan modal
2	Perizinan Berusaha	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan perusahaan besar	Mebutuhkan akses mudah, biaya transparan, waktu pelayanan cepat, dan prosedur sederhana untuk memulai dan mengembangkan usaha
3	Non-Perizinan	Pelayanan Non-Perizinan (rekomendasi, konsultasi, informasi layanan)	Masyarakat umum, pelaku usaha, organisasi/lembaga	Mebutuhkan informasi yang jelas, layanan konsultasi usaha, serta pendampingan administratif dalam mengurus izin/non-izin
4	Layanan Publik Terpadu	Mal Pelayanan Publik (MPP)	Masyarakat pencari layanan administrasi dan perizinan lintas sektor	Mebutuhkan akses satu pintu, efisiensi waktu, pelayanan ramah, dan integrasi antar-perangkat daerah
5	Pengawasan dan Pengendalian	Monitoring dan Evaluasi Investasi/Perizinan	Perusahaan/industri yang telah memperoleh izin usaha dan beroperasi	Mebutuhkan bimbingan pemenuhan komitmen izin, kepastian hukum, pendampingan CSR, serta pengawasan yang adil dan transparan

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah tidak dapat bekerja secara sendiri. Kemitraan dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif. Mitra perangkat daerah mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, hingga media, yang masing-masing berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, identifikasi dan penguatan kolaborasi dengan mitra menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan publik di daerah.

Tabel 2.8 Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra PD	Sasaran Layanan	Jenis Layanan
1	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) / Kementerian Investasi RI	Investor PMA & PMDN	Kebijakan dan fasilitasi investasi, sinkronisasi regulasi, promosi investasi
2	Dinas Teknis terkait (Lingkungan Hidup, PUPR, Perhubungan, Kesehatan, Pertanian, dll.)	Pelaku usaha & masyarakat	Rekomendasi teknis perizinan, verifikasi dokumen, kajian kelayakan usaha
3	Dinas Dukcapil & Kemenkumham	Masyarakat & pelaku usaha	Verifikasi identitas penduduk, legalitas badan hukum (akta, notaris, NIB)
4	KPP Pratama / Dirjen Pajak & BPN	Pelaku usaha & investor	NPWP, aspek perpajakan, sertifikasi tanah/usaha
5	Perbankan & lembaga keuangan	UMKM & investor	Fasilitasi pembiayaan, kredit usaha rakyat, investasi permodalan
6	KADIN, HIPMI, Asosiasi Usaha	Dunia usaha & UMKM	Pendampingan, informasi peluang usaha, advokasi kebijakan investasi
7	Media & LSM lokal	Masyarakat umum	Publikasi, sosialisasi kebijakan investasi, pengawasan partisipatif
8	Perguruan Tinggi / Akademisi	Pelaku usaha & pemerintah daerah	Kajian kebijakan, riset potensi investasi, pendampingan teknis

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik antar-perangkat daerah maupun lintas lembaga. Misalnya, koordinasi dengan **Dinas Teknis** diperlukan untuk menerbitkan rekomendasi teknis sebagai syarat izin. Dengan **BKPM/Kementerian Investasi**, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang mendapat dukungan dalam promosi investasi dan sinkronisasi regulasi. Kerja sama dengan **perbankan dan lembaga keuangan** membantu pelaku usaha, khususnya UMKM, memperoleh akses permodalan. Selain itu, kolaborasi dengan **KADIN, HIPMI, media, dan akademisi** memperkuat jejaring usaha, penyebaran informasi, serta kajian kebijakan berbasis riset.

Selain itu dinas teknis terkait yang sudah bergabung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bengkayang, seperti Disdukcapil, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, PUPR, ATR/BPN, Kejaksaan, BNN, Polres, Bapenda, Bapenda Kalbar, PDAM, Dinas Sosial, Bank Kalbar, KP2KP termasuk DPMPTSP sendiri memiliki peran strategis dalam pelaksanaan integrasi layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bengkayang. Kehadiran instansi-instansi ini menjadi wujud nyata integrasi layanan publik yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi, perizinan, serta layanan hukum, perpajakan, dan sosial dalam satu lokasi terpadu.

Kemitraan ini menjadi faktor penting agar pelayanan perizinan dan penanaman modal di Bengkayang berjalan **lebih cepat, transparan, akuntabel, dan berdaya saing.**

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sinergi antar unsur pemerintahan daerah menjadi hal yang sangat penting, termasuk kerja sama antara perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD sebagai entitas usaha yang dimiliki pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, baik melalui penyediaan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, maupun kontribusi pendapatan asli daerah (PAD).

Peran dan dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah dapat berupa kolaborasi dalam pelaksanaan program, penyediaan infrastruktur atau sarana pendukung, serta keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, BUMD juga dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas jangkauan layanan kepada kelompok sasaran yang lebih luas. Berikut ini adalah tabel yang memuat dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja masing-masing perangkat daerah:

Tabel 2.9 Dukungan BUMD

No	Nama BUMD	Bentuk Dukungan
1	PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)	Penyediaan layanan air bersih bagi masyarakat dan dunia usaha, mendukung kesehatan lingkungan, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2	Bank Kalbar	Penyediaan akses pembiayaan, perbankan, dan layanan keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mendukung UMKM, serta memperkuat inklusi keuangan lokal

Dalam rangka pencapaian kinerja perangkat daerah, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran yang strategis. BUMD tidak hanya bertugas sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan finansial, namun juga menjadi instrumen pembangunan daerah melalui penyediaan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- **PDAM** mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan air bersih yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus menjaga sanitasi lingkungan.
- **Bank Pembangunan Daerah (BPD)** berperan dalam memperkuat perekonomian melalui penyediaan akses pembiayaan bagi masyarakat,

pelaku UMKM, serta pemerintah daerah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.10 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Pelaksanaan Penanaman Modal masih Rendah	1. Kurangnya minat investor berinvestasi di daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya rencana umum penanaman modal yang mengacu pada rencana detail tata ruang daerah 2. Belum terintegrasinya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kedalam system perizinan 3. Keterbatasan bahan promosi investasi, yang berakibat pada terhambatnya peningkatan promosi dan kerjasama penanaman modal 4. Adanya Pelaku usaha yang “naik kelas”, misal dari jenis usaha mikro/kecil berkembang menjadi usaha menengah/besar, sehingga lahan tidak sesuai lagi dengan peruntukannya
		2. Belum optimalnya data realisasi investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya kesadaran Investor menyampaikan LKPM 2. Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi dan perizinan
2	Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan masih belum optimal	1. Belum optimalnya sarana dan prasarana sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi secara online	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya regulasi nasional dan daerah yang mendukung proses pelayanan perizinan secara online 2. Perangkat jaringan Telekomunikasi yang belum tersebar merata di semua kecamatan di Kabupaten Bengkayang sehingga membatasi akses internet masyarakat terhadap sistem pelayanan perizinan dan non perizinan secara online serta masih terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengaplikasikan sistem pelayanan yang sudah menjadi kebijakan pemerintah 3. Masih Kurangnya sarana prasarana pendukung terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat
		2. Masih ada izin yang belum memiliki regulasi sebagai petunjuk teknis dalam proses pelayanan perizinan	Kurangnya komitmen OPD teknis dalam menyiapkan regulasi teknis yang menjadi tugas fungsi masing-masing OPD dan Peraturan Perundangan Teknis Perangkat Daerah yang masih belum maksimal

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		3. Belum tertatanya dan terdokumentasinya administrasi perizinan yang komprehensif	Kurangnya pengetahuan tentang manajemen pengelolaan administrasi dan kearsipan yang praktis, inovatif dan komprehensif
		4. Belum optimalnya proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah dan pasti	1. Regulasi yang menunjang dalam proses perizinan dan non perizinan belum tersedia secara lengkap sehingga memerlukan tahapan proses yang lebih panjang dan terkesan berbelit- belit 2. Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi, berkualitas dan profesional dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang masih Kurang 3. Adanya Pelaku usaha yang “naik kelas”, misal dari jenis usaha mikro/kecil berkembang menjadi usaha menengah/besar, sehingga lahan tidak sesuai lagi dengan peruntukannya

Berdasarkan analisis permasalahan diatas, maka permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang adalah:

1. Pelaksanaan penanaman modal masih rendah (minat investor rendah dan data realisasi investasi belum optimal)
2. Belum optimalnya regulasi dan kepastian hukum dalam mendukung investasi dan perizinan
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan perizinan yang terintegrasi secara online.
4. Belum tertatanya sistem administrasi dan dokumentasi perizinan secara komprehensif.
5. Belum optimalnya proses pelayanan perizinan dan non perizinan agar cepat, mudah, transparan, dan pasti

2.2.2 Isu Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, perangkat daerah dihadapkan pada berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan secara tepat. Isu-isu ini muncul sebagai akibat dari dinamika internal organisasi, tuntutan masyarakat, perkembangan kebijakan nasional, serta tantangan global dan regional. Identifikasi isu strategis menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta pengambilan keputusan yang efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

2.2.2.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dilakukan sebagai bagian dari upaya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah sejalan

dengan prioritas nasional serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan secara makro. Melalui telaahan ini, perangkat daerah dapat mengidentifikasi keterkaitan program sektoral pusat yang relevan, sekaligus merumuskan langkah kolaboratif untuk memperkuat implementasi kebijakan di tingkat daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Telaah terhadap Renstra Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai berikut:

Tabel 2.11 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Peningkatan realisasi investasi nasional	Realisasi investasi daerah masih rendah, minat investor belum optimal	Komitmen pemerintah pusat melalui Renstra BKPM dalam mendorong peningkatan investasi	Keterbatasan promosi investasi dan kurang optimalnya regulasi teknis di daerah
Penguatan iklim investasi yang kondusif	Belum adanya regulasi teknis yang jelas pada beberapa jenis izin, serta keterbatasan koordinasi antar perangkat daerah	Dukungan kebijakan pemerintah pusat terkait penyederhanaan perizinan	Administrasi perizinan belum terdokumentasi secara komprehensif, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi investor
Digitalisasi pelayanan perizinan	Belum optimalnya layanan perizinan berbasis online karena keterbatasan jaringan telekomunikasi dan infrastruktur daerah	Program percepatan digitalisasi layanan pemerintah (OSS)	Akses jaringan telekomunikasi belum merata hingga kecamatan dan desa
Peningkatan kapasitas SDM perizinan dan penanaman modal	Masih terbatasnya jumlah SDM yang kompeten dan profesional di bidang pelayanan perizinan dan investasi	Dukungan pelatihan dan bimbingan teknis dari BKPM maupun pemerintah provinsi	Keterbatasan anggaran daerah untuk pengembangan kapasitas SDM
Penguatan promosi investasi daerah	Kegiatan promosi dan penyediaan data potensi investasi daerah belum optimal	Dukungan program promosi investasi terpadu dari pemerintah pusat/provinsi	Keterbatasan bahan promosi dan minimnya kerjasama dengan pihak swasta/investor potensial

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran nasional di bidang investasi. Namun, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian.

Pertama, realisasi investasi di daerah masih rendah akibat terbatasnya promosi investasi dan belum optimalnya regulasi teknis. **Kedua**, iklim investasi yang kondusif belum sepenuhnya tercapai karena kelemahan dalam

sistem administrasi dan dokumentasi perizinan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor. **Ketiga**, digitalisasi layanan perizinan menghadapi kendala infrastruktur jaringan telekomunikasi yang belum merata, sehingga pelayanan online belum sepenuhnya optimal.

Selain itu, masih terdapat keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM yang memiliki kompetensi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Kegiatan promosi investasi juga belum maksimal karena keterbatasan bahan promosi serta minimnya kerjasama dengan pihak swasta.

Meskipun demikian, terdapat faktor pendukung yang cukup kuat, seperti komitmen pemerintah pusat melalui Renstra BKPM, penyederhanaan regulasi perizinan, serta dukungan digitalisasi layanan (OSS). Hal ini menjadi peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang untuk mempercepat penyelarasan program daerah dengan kebijakan nasional.

Dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas SDM, memperluas digitalisasi, serta mengoptimalkan promosi investasi berbasis potensi unggulan daerah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang akan lebih siap dalam mendukung target nasional peningkatan investasi.

2.2.2.2 Telaahan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Provinsi dilakukan untuk memastikan keselarasan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Telaahan ini menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan yang terintegrasi dan sinergis, khususnya dalam hal dukungan program lintaswilayah, pembinaan urusan pemerintahan, serta pencapaian target pembangunan daerah yang bersifat makro. Melalui proses ini, perangkat daerah dapat merumuskan strategi yang responsif terhadap prioritas pembangunan provinsi sekaligus memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat Telaah terhadap Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

Tabel 2.12 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Peningkatan realisasi investasi daerah	Masih rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Bengkayang dibandingkan target provinsi	Dukungan program investasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Minimnya promosi investasi dan keterbatasan fasilitas penunjang di daerah
Peningkatan kualitas layanan perizinan	Waktu penyelesaian perizinan masih belum konsisten sesuai standar pelayanan	Adanya standar pelayanan minimum yang ditetapkan provinsi	Keterbatasan SDM yang terampil dalam pengelolaan sistem perizinan
Penguatan koordinasi antar daerah dalam menarik investasi	Koordinasi lintas daerah masih lemah, sehingga sulit menarik investor skala besar	Adanya forum koordinasi dan dukungan provinsi dalam promosi bersama	Masih adanya ego sektoral antar daerah dalam promosi potensi unggulan
Percepatan transformasi digital perizinan	Belum semua layanan perizinan terintegrasi dengan sistem provinsi (OSS)	Program digitalisasi perizinan provinsi	Infrastruktur jaringan internet di beberapa kecamatan masih terbatas
Peningkatan kapasitas aparatur	Kompetensi aparatur di bidang pelayanan perizinan dan investasi masih bervariasi	Dukungan pelatihan dan fasilitasi dari provinsi	Keterbatasan anggaran daerah untuk pelatihan berkelanjutan

Telaahan terhadap Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara sasaran provinsi dengan kondisi aktual pelayanan di Kabupaten Bengkayang. Salah satu kesenjangan utama terlihat pada realisasi investasi, di mana kontribusi Kabupaten Bengkayang masih relatif kecil terhadap pencapaian target investasi provinsi. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya promosi investasi serta keterbatasan sarana pendukung.

Dari sisi pelayanan perizinan, meskipun telah tersedia standar pelayanan minimum dari pemerintah provinsi, pelaksanaannya di daerah belum sepenuhnya konsisten akibat keterbatasan SDM yang kompeten dalam pengelolaan sistem perizinan. Koordinasi lintas daerah dalam menarik investasi juga masih menjadi tantangan, karena adanya ego sektoral dalam promosi potensi unggulan masing-masing daerah.

Transformasi digital perizinan merupakan prioritas provinsi, namun implementasinya di Bengkayang belum maksimal karena infrastruktur internet di beberapa wilayah masih terbatas. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur juga menjadi isu penting, sebab kemampuan teknis SDM dalam

pelayanan perizinan masih bervariasi dan anggaran untuk pelatihan berkelanjutan masih terbatas.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah faktor pendukung, seperti adanya komitmen Pemerintah Provinsi Kalbar melalui kebijakan investasi, forum koordinasi lintas daerah, serta program digitalisasi perizinan. Dengan memperkuat kolaborasi antar daerah, memanfaatkan dukungan provinsi, serta fokus pada peningkatan SDM dan infrastruktur digital, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang berpotensi lebih optimal dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra Provinsi.

2.2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkayang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 - 2034. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan perizinan berusaha dan penanaman modal memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.13 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang ditinjau dari implikasi RTRW

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Pengembangan kawasan investasi strategis (industri, UMKM, perdagangan)	<ul style="list-style-type: none">- Dukungan kebijakan RTRW- Ketersediaan lahan- Potensi pasar lokal & regional	<ul style="list-style-type: none">- Infrastruktur dasar terbatas- Aksesibilitas wilayah belum merata
2	Pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan sebagai pintu perdagangan	<ul style="list-style-type: none">- Posisi strategis berbatasan langsung dengan Malaysia- Potensi ekspor-impor	<ul style="list-style-type: none">- Lemahnya pengawasan tata ruang- SDM terbatas dalam fasilitasi investasi lintas negara
3	Pengembangan pelayanan perizinan berbasis digital & transparansi tata ruang	<ul style="list-style-type: none">- Kebijakan OSS & digitalisasi pelayanan- Dukungan regulasi perizinan terpadu	<ul style="list-style-type: none">- Teknologi informasi belum merata- Kapasitas SDM masih bervariasi
4	Penataan ruang untuk mendukung iklim investasi berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">- Kepastian hukum RTRW- Sinergi lintas sektor dalam perencanaan	<ul style="list-style-type: none">- Tumpang tindih regulasi sektoral- Koordinasi antar OPD belum optimal



Berdasarkan telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkayang, terdapat beberapa aspek yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang. RTRW memberikan arah kebijakan yang mendorong pengembangan kawasan investasi strategis, termasuk sektor industri, perdagangan, dan UMKM. Hal ini menjadi pendorong utama karena didukung oleh ketersediaan lahan, kebijakan tata ruang, serta potensi pasar lokal maupun regional. Namun, keterbatasan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah yang belum merata masih menjadi hambatan dalam realisasinya.

Selain itu, pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan juga menjadi peluang besar bagi peningkatan investasi, mengingat posisi strategis Bengkayang yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Faktor pendorong ini diperkuat oleh potensi ekspor-impor, meskipun masih terkendala oleh lemahnya pengawasan tata ruang serta keterbatasan sumber daya manusia dalam mendukung fasilitasi investasi lintas negara.

Dalam aspek pelayanan perizinan, arah RTRW sejalan dengan upaya digitalisasi dan transparansi melalui penerapan sistem OSS dan pelayanan terpadu. Dukungan regulasi menjadi faktor pendorong yang kuat, tetapi tantangan yang muncul adalah belum meratanya infrastruktur teknologi informasi serta kapasitas sumber daya manusia yang masih bervariasi.

Terakhir, penataan ruang untuk mendukung iklim investasi berkelanjutan menjadi fokus penting. Kepastian hukum RTRW serta sinergi lintas sektor menjadi pendorong terciptanya kepastian berusaha. Namun, tumpang tindih regulasi sektoral dan koordinasi antar-OPD yang belum optimal masih menjadi penghambat dalam penerapannya.

2.2.2.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.



Tabel 2.14 Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD (1)	Permasalahan PD (2)	Isu KLHS yang Relevan dengan PD (3)	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD				Isu Strategis PD (7)
			Global (4)	Nasional (5)	Regional (6)		
Meningkatkan investasi Daerah	1. Pelaksanaan Penanaman Modal masih Rendah	1. Aktifitas kegiatan dibidang Penanaman Modal berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran udara dan air khususnya pada kegiatan-kegiatan investasi yang sudah beroperasi sehingga perlu dilakukan study kelayakan lingkungan berupa AMDAL,UKL/UPL.	Peningkatan suhu global, kejadian cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, gangguan pertanian, dan peningkatan risiko bencana alam yang dapat menghambat investasi dan pembangunan daerah.	Penggunaan sumber daya alam secara tidak berkelanjutan, seperti air dan energi, dapat menimbulkan konflik sosial dan ekonomi, serta menghambat investasi di sektor industri dan pertanian.	Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan dapat merusak infrastruktur, mengganggu aktivitas ekonomi, dan menghambat investasi di daerah rentan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Promosi dan Informasi terkait Peluang Investasi. 2. Keterbatasan SDM Yang trampil dan Kompeten 3. Regulasi yang Rumit dan tidak jelas 4. Ketidakpastian Hukum dan Kebijakan 	
	2. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan masih belum optimal	2. Menimbulkan Konflik Sosial terkait Penggunaan Lahan dari alih Fungsi Lahan untuk pembangunan dan perluasan usaha prasarana dan fasilitas Kegiatan Investasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengrusakan hutan dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, peningkatan emisi gas rumah kaca, dan kerusakan ekosistem, yang dapat berdampak pada sektor pariwisata dan pertanian di daerah. 2. Penurunan keanekaragaman hayati dapat mengurangi 	Pencemaran udara, air, dan tanah dapat merusak kesehatan masyarakat, mengurangi kualitas hidup, dan menghambat investasi di sektor pariwisata.	Keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, masalah kesehatan, dan menghambat investasi di sektor pariwisata dan industri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya integrasi: Kurangnya integrasi antara instansi terkait dapat menghambat pelayanan 2. Kualitas pelayanan yang kurang baik 3. Keterlambatan: Keterlambatan dalam proses perizinan dapat menghambat kegiatan usaha. 	



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD (1)	Permasalahan PD (2)	Isu KLHS yang Relevan dengan PD (3)	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			
			Global (4)	Nasional (5)	Regional (6)	Isu Strategis PD (7)
			produktivitas ekosistem, mengganggu rantai makanan, dan mengurangi daya tarik pariwisata di daerah			



Dalam rangka mewujudkan peningkatan investasi daerah sebagai salah satu potensi utama Kabupaten Bengkayang, terdapat sejumlah isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang.

Pertama, rendahnya realisasi penanaman modal di daerah masih menjadi kendala signifikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masih adanya hambatan dalam pemberian perizinan, keterbatasan dukungan infrastruktur, serta kurang maksimalnya kegiatan promosi dan informasi terkait peluang investasi yang tersedia di Kabupaten Bengkayang. Ditambah para calon investor kurang memahami regulasi dan prosedur mengenai perizinan sehingga beranggapan regulasi maupun prosedur terlihat kompleks dan sangat memberatkan. Akibatnya, potensi besar yang dimiliki daerah, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, pariwisata, dan sektor unggulan lainnya, belum dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.

Kedua, pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang belum sepenuhnya optimal juga menjadi perhatian utama. Masih terdapat keluhan terkait keterlambatan layanan, keterbatasan integrasi sistem, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pelayanan. Hal ini berdampak pada rendahnya kepercayaan investor dan pelaku usaha, sehingga mengurangi minat investasi baru di Kabupaten Bengkayang.

Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang juga menghadapi tantangan global, nasional, dan regional yang berpengaruh terhadap dinamika investasi daerah. Secara global, isu perubahan iklim, ketidakstabilan harga komoditas, dan kompetisi antarwilayah menuntut Kabupaten Bengkayang untuk lebih adaptif dan responsif. Di tingkat nasional, isu terkait keterbatasan lahan produktif, pencemaran lingkungan, dan kebijakan ketat mengenai kelestarian hutan turut menjadi faktor pembatas dalam pengembangan investasi. Sementara di tingkat regional, adanya bencana alam, keterbatasan infrastruktur, serta kesenjangan aksesibilitas antarwilayah menyebabkan hambatan mobilitas barang, jasa, dan orang yang berimplikasi langsung terhadap iklim investasi.

Dari kondisi tersebut, terdapat beberapa isu strategis utama yang perlu ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang, yaitu:

1. Kurangnya promosi dan informasi investasi, sehingga peluang yang ada tidak diketahui secara luas oleh calon investor.
2. Keterbatasan kualitas SDM dalam pelayanan perizinan yang berdampak pada rendahnya daya saing daerah.
3. Kompleksitas regulasi dan ketidakjelasan prosedur, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor.

4. Kurangnya integrasi sistem perizinan dan nonperizinan, sehingga proses pelayanan masih lambat dan belum efisien.
5. Keterbatasan infrastruktur pendukung investasi, terutama aksesibilitas transportasi, listrik, dan sarana penunjang lainnya.

Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang perlu memperkuat perannya sebagai *leading sector* dalam fasilitasi investasi, dengan cara meningkatkan kualitas layanan perizinan berbasis digital, memperluas kegiatan promosi dan publikasi peluang investasi, memperbaiki regulasi yang sederhana dan transparan, serta membangun koordinasi lintas sektor untuk menghadirkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.

2.2.2.5 Isu/Kesenjangan Gender

Berdasarkan hasil analisis *Gender Analysis Pathway* (GAP), komposisi ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang relatif seimbang, yaitu 18 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari sisi jumlah pegawai tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Tabel 2.15 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Kepala Dinas	1	0
Sekretaris	0	1
Administrasi Umum	0	1
Jabatan Fungsional Ahli Madya	2	0
Jabatan Fungsional Ahli Muda	3	4
Jabatan Fungsional Ahli Pertama	2	0
Staff/Pelaksana	10	13
TOTAL	18	19

Sumber: *Bezetting dan DUK DPMPTSP Agustus 2025*

Arah Kebijakan

1. Mendorong keterwakilan perempuan dalam jabatan struktural dan fungsional, terutama pada posisi strategis dan pengambilan keputusan.
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai perempuan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karier.
3. Mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran.
4. Menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan setara, yang mendukung keseimbangan peran laki-laki dan perempuan.



Strategi

1. Penguatan Kapasitas Perempuan

- Menyediakan program pelatihan kepemimpinan, manajerial, dan teknis khusus bagi pegawai perempuan.
- Memberikan akses yang adil bagi perempuan untuk mengikuti diklat dan sertifikasi kompetensi.

2. Peningkatan Kesempatan Karier

- Membuka peluang promosi jabatan yang transparan.
- Memberikan kesempatan rotasi jabatan bagi pegawai perempuan untuk memperluas pengalaman kerja.

3. Integrasi Gender dalam Kebijakan dan Perencanaan

- Memastikan seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang memuat analisis gender.
- Menetapkan indikator kinerja responsif gender dalam setiap program/kegiatan.

4. Penciptaan Lingkungan Kerja Inklusif

- Mendorong budaya kerja yang mendukung kesetaraan gender.
- Menyediakan fasilitas ramah gender, termasuk dukungan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga.



BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah rumusan umum tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu instansi atau organisasi dalam jangka menengah. Tujuan ini mengarahkan visi dan misi organisasi agar lebih terukur dan bisa dijabarkan ke dalam sasaran dan program kerja. Sasaran adalah penjabaran lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus selaras dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah.

Visi dan misi Kabupaten Bengkayang mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita Kabupaten Bengkayang yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, yaitu:

“ KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, dan BERKELANJUTAN”

Visi tersebut selain menggambarkan kondisi yang akan dicapai di akhir tahun rencana, juga menandai pencapaian kondisi yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkayang
Sedangkan Misi Kabupaten Bengkayang dalam mendukung visi tersebut antara lain:

Misi 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan berbudaya

Misi ini dimaksudkan bahwa mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan berbudaya sebagai karakter SDM berkualitas merupakan syarat mutlak tercapainya Visi Kabupaten Bengkayang. Keberhasilan pencapaian misi ini dengan ditandai dengan adanya peningkatan peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai budaya dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas.

Misi 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipasif dan transparan, responsif, efektif serta akuntabel dengan cara peningkatan profesional dan kualitas birokrasi yang sejalan prinsip reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.

Misi 3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur



Misi ini dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi 4. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif

Misi ini dimaksudkan untuk penguatan fundamental perekonomian yang didukung prasarana ekonomi serta peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga perekonomian daerah semakin kuat, serta ekonomi kerakyatan semakin tumbuh dan berkembang. Disisi lainnya, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan penguatan sinergitas program.

Misi 5. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan kondusifitas wilayah

Misi ini dimaksudkan bahwa proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung sumber daya serta lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan demi terciptanya kondusifitas wilayah.

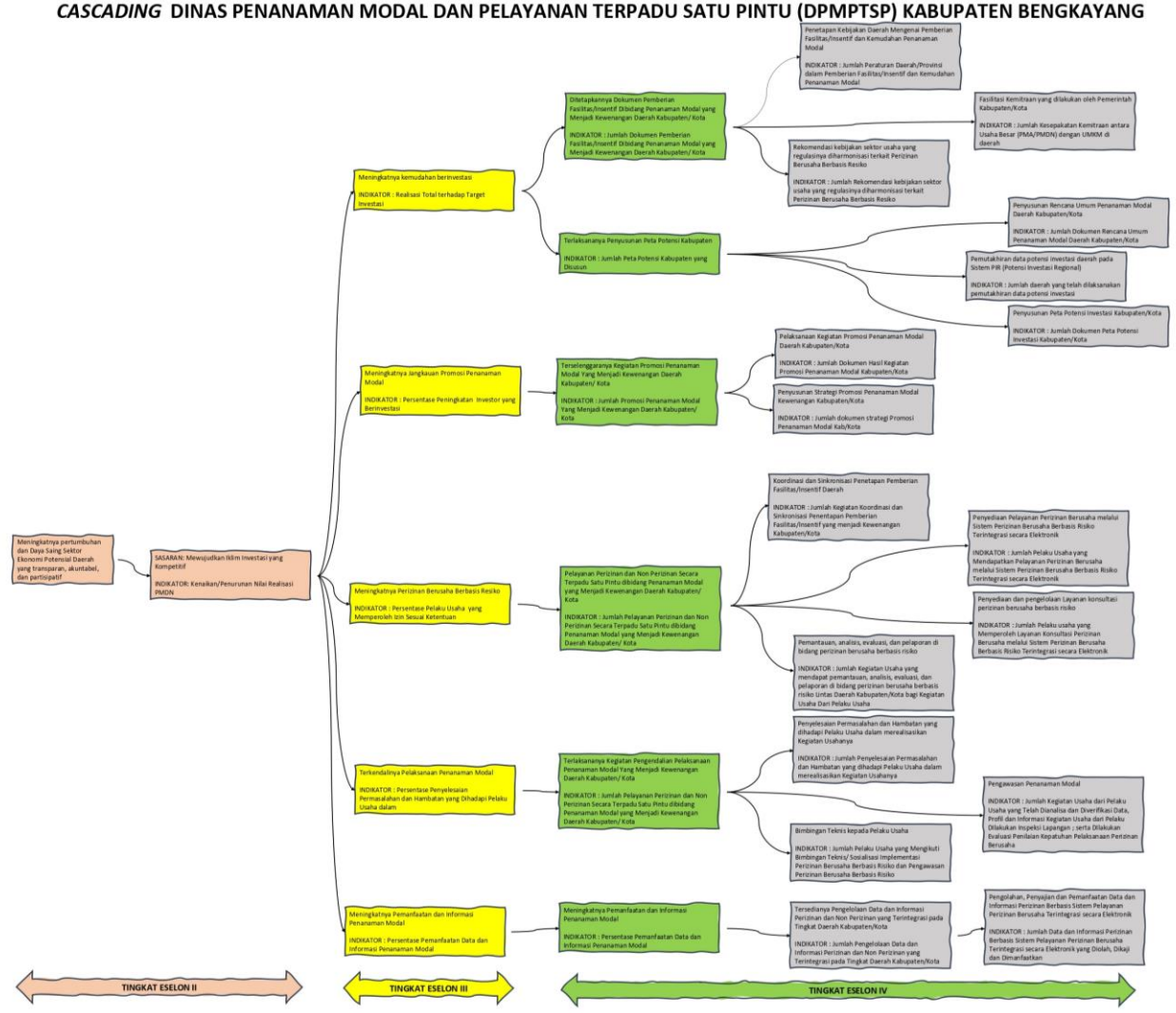
Dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Misi 2 dan Misi 4. Pada Misi 2 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel”, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang berkontribusi melalui peningkatan kualitas tata kelola layanan perizinan yang lebih transparan, cepat, dan terintegrasi. Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bengkayang yang telah beroperasi pada bulan Februari tahun 2025 menjadi bentuk nyata dari upaya reformasi birokrasi yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang akuntabel serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sementara itu, pada Misi 4, yaitu “Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif”, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang berperan sebagai motor penggerak investasi daerah melalui kemudahan layanan perizinan, fasilitasi penanaman modal, serta dukungan kepada pelaku usaha dan UMKM. Dengan meningkatnya realisasi investasi dan terciptanya iklim usaha yang kondusif, kontribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan inklusif. Keterhubungan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang tidak hanya berperan dalam



memperkuat tata kelola pemerintahan, tetapi juga dalam mendorong pembangunan ekonomi yang selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkayang 2025-2029.



CASCADING DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BENGKAYANG



Gambar 3.1 Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang



Tabel 3.1 Perumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Tahun						Kondisi Akhir	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
- Meningkatnya pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi Potensial Daerah - Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi Potensial Daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	65.20	65.50	65.75	66	67	68	68	
			PMTB ADHB Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)	4175.12	4479.32	4728.69	5043.71	5341.29	5678.12	5678.12	
	Meningkatnya Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Angka)	85.75	86	87	88	89	90	90		
	Optimalisasi Nilai Realisasi PMDN	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (%)	3.00	3.09	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
	Meningkatnya Rasio Daya serap Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Nilai)	65.8	69.09	72.54	76.17	79.98	83.98	83.98		
	Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) (Perusahaan)	98	103	108	113	115	125	125		
	Meningkatnya Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) (Milyar Rupiah)	713.05	735.11	771.87	810.46	850.98	893.53	893.53		

Sumber: SIPD Renstra DPMPTSP 2025



Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang memiliki orientasi kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan iklim investasi, pelayanan publik yang transparan, serta partisipasi masyarakat. Tujuan utama yang ditetapkan adalah meningkatkan pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah dengan indikator-indikator terukur yang menggambarkan kualitas pelayanan maupun peningkatan realisasi investasi.

Sasaran pertama adalah meningkatkan nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik perangkat daerah. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan indikator Nilai AKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditargetkan meningkat secara bertahap hingga tahun 2030. Kondisi akhir menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun perlu konsistensi dalam menjaga kualitas layanan agar selaras dengan target RPJMD.

Sasaran berikutnya menekankan optimalisasi realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Target kenaikan realisasi investasi tercermin dari persentase nilai realisasi PMDN, yang diproyeksikan meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan peran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang sebagai motor penggerak investasi daerah. Meski kondisi akhir menunjukkan capaian yang relatif baik, namun terdapat gap yang harus diantisipasi agar target pertumbuhan investasi tetap realistis dan berkesinambungan.

Selain itu, peningkatan rasio daya serap tenaga kerja menjadi fokus penting, mengingat kontribusi investasi harus mampu menghadirkan *multiplier effect* bagi kesejahteraan masyarakat. Target rasio penyerapan tenaga kerja yang terus meningkat menunjukkan adanya orientasi terhadap pemerataan manfaat pembangunan ekonomi, tidak hanya sebatas capaian angka investasi.

Secara keseluruhan, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta pro-investasi. Peningkatan kualitas layanan, optimalisasi investasi, dan perluasan daya serap tenaga kerja diharapkan dapat berkontribusi terhadap daya saing ekonomi daerah dan pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah.

3.2 Strategi Perangkat Daerah

Strategi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan

dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Subbab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029.

Tabel 3.2 Perumusan Strategi

	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
	<ul style="list-style-type: none"> -Jumlah penduduk Kab. Bengkayang yang cukup besar; -Kemampuan ekonomi masyarakat yang cukup memadai; -Tingginya minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> -Kondisi geografis daerah yang berbatasan langsung dengan luar negeri; -Kesadaran masyarakat untuk mengurus berbagai perizinan masih rendah; -Masih adanya praktek percaloan dalam pengurusan perizinan
Kekuatan (<i>Strength</i>)	Strategi S-O	Strategi S-T
<ul style="list-style-type: none"> -Adanya peraturan perundangan yang mendukung; -Jumlah pegawai cukup memadai; -Adanya dukungan dan komitmen dari Bupati Bengkayang -Adanya dukungan dari <i>team work</i> (Tim Pembina Dan Tim Teknis) 	<ul style="list-style-type: none"> -Dengan jumlah penduduk yang cukup besar dimungkinkan untuk mengurus perizinan yang diperlukan -Dengan kemampuan ekonomi masyarakat yang cukup memadai memungkinkan untuk membuka usaha baru -Tingginya minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah secara kuantitas dan kualitas dapat ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> -Peraturan perundangan yang jelas dapat mengurangi praktek percaloan perizinan -Jumlah pegawai cukup memadai dapat mengatasi kondisi geografis daerah -Adanya dukungan dan komitmen dari Bupati Bengkayang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat -Adanya dukungan dari <i>team work</i> (Tim Pembina Dan Tim Teknis), dapat kesadaran masyarakat
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Strategi W-O	Strategi W-T
<ul style="list-style-type: none"> -Kurangnya keterampilan petugas atau staf pelayanan; -Sistem komputerisasi yang belum memadai; -Prosedur pelayanan perizinan yang belum dipahami secara baik oleh masyarakat; 	<ul style="list-style-type: none"> -Dengan jumlah penduduk yang cukup besar dimungkinkan untuk mengurus perizinan yang diperlukan, staf semakin ditingkatkan keterampilannya -Kemampuan ekonomi masyarakat yang cukup memadai diperlukan sosialisasi secara intensif -Tingginya minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah diperlukan sistem komputerisasi yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> -Dengan peraturan perundangan yang transparan dan jelas dapat mengurangi praktek percaloan perizinan -Dengan jumlah pegawai cukup memadai, dapat melayani masyarakat sekaligus mengatasi kondisi geografis daerah -Dengan adanya dukungan dan komitmen dari Bupati Bengkayang, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengurus izin -Dengan dukungan dari <i>team work</i> (Tim Pembina Dan Tim Teknis), dapat meningkatkan kesadaran masyarakat

Tabel 3.3 Penentuan Strategi

No	Sasaran	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Digitalisasi layanan perizinan melalui aplikasi terpadu	Pengembangan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik (OSS daerah)
2	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perizinan	Penerapan standar pelayanan publik dan sistem monitoring	Mewujudkan layanan perizinan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas

No	Sasaran	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
3	Meningkatkan iklim investasi daerah yang kondusif	Penyusunan regulasi/instrumen kemudahan investasi	Menciptakan regulasi yang mendukung iklim investasi dan meningkatkan kepastian berusaha di daerah
4	Meningkatkan promosi dan informasi peluang investasi daerah	Promosi investasi melalui media digital, pameran, dan forum bisnis	Optimalisasi promosi potensi investasi daerah berbasis data dan teknologi informasi
5	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam mendukung investasi daerah	Penguatan kerja sama dengan perangkat daerah lain serta stakeholder swasta	Mewujudkan sinergi lintas sektor untuk mendukung percepatan investasi daerah
6	Meningkatkan kontribusi penanaman modal terhadap PAD	Mendorong kerjasama investasi dengan BUMD dan sektor swasta	Pemanfaatan BUMD dan kemitraan strategis untuk meningkatkan realisasi investasi dan pendapatan daerah
7	Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pelayanan publik	Pelatihan dan pengembangan SDM aparatur pelayanan perizinan dan investasi	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur untuk pelayanan prima di bidang penanaman modal dan PTSP

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Subbab ini menghadirkan formulasi Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang.

Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penyusunan dasar sistem pelayanan perizinan berbasis digital (e-Perizinan)	Integrasi layanan perizinan dan penanaman modal dengan OSS nasional	Optimalisasi implementasi sistem pelayanan perizinan online	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis evaluasi kinerja	Konsolidasi dan inovasi layanan perizinan serta investasi yang lebih proaktif
Penguatan regulasi daerah terkait investasi dan perizinan	Penyederhanaan dan standarisasi prosedur perizinan	Penerapan pelayanan perizinan dengan standar ISO	Penguatan sistem monitoring dan pengawasan investasi	Pencapaian target pelayanan prima dan daya saing investasi daerah
Pemetaan potensi investasi daerah (sektor unggulan)	Promosi investasi secara nasional dan regional	Promosi investasi berskala internasional	Ekspansi kerjasama investasi lintas sektor dan antar daerah	Terwujudnya Bengkayang sebagai tujuan investasi berdaya saing tinggi
Peningkatan kapasitas aparatur (pelatihan teknis perizinan dan investasi)	Pembinaan SDM aparatur untuk pelayanan prima	Pengembangan aparatur berbasis kompetensi digital	Penguatan budaya kerja berintegritas dan berorientasi pelayanan	Aparatur yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing global
Penguatan koordinasi lintas PD dalam mendukung investasi	Sinergi BUMD dan swasta untuk mendukung investasi daerah	Penguatan kolaborasi dengan sektor swasta, asosiasi usaha, dan investor asing	Ekspansi kemitraan strategis investasi (PPP/kerjasama internasional)	Model investasi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat

Penyajian lokus Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang, disusun dengan mengacu pada ketentuan **Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 47 poin 8**, yang menyatakan bahwa lokus Renstra dapat ditetapkan berdasarkan kecamatan dan/atau wilayah pengembangan serta disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Penyajian lokus Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang diarahkan untuk mendukung pengembangan **wilayah strategis**, antara lain:

- **Kecamatan Bengkayang** sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik, menjadi fokus peningkatan kualitas pelayanan perizinan terpadu serta pusat informasi investasi. Keberadaan **Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bengkayang** semakin memperkuat fungsi wilayah ini sebagai simpul layanan terintegrasi, yang menghadirkan berbagai jenis pelayanan perizinan maupun non-perizinan dari lintas

instansi, sehingga masyarakat dapat memperoleh kemudahan, kecepatan, dan kepastian dalam mengakses layanan publik

- **Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan** sebagai kawasan pesisir dan maritim dengan potensi perdagangan, jasa, serta pariwisata, menjadi prioritas fasilitasi investasi sektor pariwisata dan perikanan tangkap/budidaya,
- **Kecamatan Jagoi Babang dan Seluas** sebagai kawasan perbatasan, menjadi fokus pengendalian investasi di wilayah perbatasan.
- **Kecamatan Monterado, Samalantan, dan sekitarnya** sebagai sentra usaha UMKM, potensi sumber daya alam dan pertanian, menjadi lokus pelayanan izin usaha skala kecil/menengah, perkebunan dan usaha berbasis sumber daya alam.

Penyajian lokus ini menegaskan fokus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang dalam memperkuat pelayanan perizinan dan penanaman modal sesuai arah kebijakan RPJMD, dengan prioritas pada kawasan potensial dan strategis. Dengan demikian, lokus Renstra tidak hanya berfungsi sebagai peta prioritas pelayanan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong **pertumbuhan investasi, pemerataan pelayanan, dan daya saing daerah**, guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bengkayang yang **maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan**.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi Potensial Daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Menguatkan kebijakan dan institusional yang mendorong kemudahan berusaha	<p>Penyederhanaan Proses Perizinan/ Menyederhanakan proses perizinan melalui penggunaan teknologi informasi</p> <p>Peningkatan transparansi/ Meningkatkan transparansi dalam proses perizinan dan kebijakan investasi</p> <p>Pengembangan Infrastruktur/ Membangun dan meningkatkan infrastruktur untuk mendukung investasi</p> <p>Promosi Investasi/ Melakukan promosi investasi untuk menarik investor</p>	<p>Kebijakan investasi yang kondusif: Mengembangkan kebijakan investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi</p> <p>Pengurangan birokrasi: Mengurangi birokrasi dan mempercepat proses perizinan</p> <p>Peningkatan kualitas layanan: Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan investasi</p> <p>Kerja sama dengan investor: Membangun kerja sama dengan investor untuk meningkatkan investasi</p>	



NO	Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Penggunaan media digital: Menggunakan media digital seperti website, media sosial, dan iklan online untuk meningkatkan jangkauan promosi	Peningkatan anggaran promosi: Meningkatkan anggaran promosi untuk meningkatkan jangkauan promosi	
			Kerja sama dengan investor: Membangun kerja sama dengan investor dan asosiasi industri untuk meningkatkan jangkauan promosi	Pengembangan strategi promosi: Mengembangkan strategi promosi yang efektif dan terarah untuk meningkatkan jangkauan promosi	
			Partisipasi dalam event internasional: Mengikuti event internasional seperti pameran dan konferensi untuk meningkatkan jangkauan promosi	Peningkatan kualitas promosi: Meningkatkan kualitas promosi melalui pengembangan materi promosi yang menarik dan informatif	
			Pengembangan materi promosi: Mengembangkan materi promosi yang menarik dan informatif untuk meningkatkan jangkauan promosi	Evaluasi dan monitoring: Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan promosi untuk meningkatkan efektivitas promosi	
			Pengembangan sistem perizinan online: Mengembangkan sistem perizinan online yang terintegrasi dan berbasis resiko untuk mempercepat proses perizinan	Pengembangan peraturan perizinan: Mengembangkan peraturan perizinan yang jelas dan berbasis resiko untuk meningkatkan kepastian hukum	
			Klasifikasi usaha berbasis resiko: Mengembangkan klasifikasi usaha berbasis resiko untuk menentukan tingkat resiko dan jenis perizinan yang diperlukan	Penguatan kelembagaan: Menguatkan kelembagaan perizinan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses perizinan	
			Pengurangan dokumen perizinan: Mengurangi jumlah dokumen perizinan yang diperlukan untuk mempercepat proses perizinan	Peningkatan kualitas pelayanan: Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui peningkatan kompetensi dan integritas petugas perizinan	
			Peningkatan transparansi: Meningkatkan transparansi dalam proses perizinan melalui publikasi informasi tentang proses perizinan dan keputusan perizinan	Monitoring dan evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses perizinan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perizinan	



NO	Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pengembangan sistem monitoring: Mengembangkan sistem monitoring yang efektif untuk memantau pelaksanaan penanaman modal	Pengembangan kebijakan penanaman modal: Mengembangkan kebijakan penanaman modal yang jelas dan efektif untuk meningkatkan investasi	
			Penguatan regulasi: Menguatkan regulasi penanaman modal untuk meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi risiko	Penguatan kelembagaan: Menguatkan kelembagaan penanaman modal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penanaman modal	
			Peningkatan koordinasi: Meningkatkan koordinasi antara instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan penanaman modal yang efektif	Peningkatan transparansi: Meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan penanaman modal untuk meningkatkan kepercayaan investor	
			Pengawasan lapangan: Melakukan pengawasan lapangan untuk memastikan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan rencana dan regulasi	Pengembangan sistem pelaporan: Mengembangkan sistem pelaporan yang efektif untuk memantau pelaksanaan penanaman modal dan mengidentifikasi masalah	
			Pengembangan sistem informasi: Mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dan mudah diakses untuk meningkatkan ketersediaan informasi	Pengembangan kebijakan informasi: Mengembangkan kebijakan informasi penanaman modal yang jelas dan efektif untuk meningkatkan ketersediaan informasi	
			Peningkatan kualitas informasi: Meningkatkan kualitas informasi penanaman modal melalui pengumpulan data yang akurat dan terkini	Penguatan infrastruktur informasi: Menguatkan infrastruktur informasi penanaman modal untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas informasi	
			Diseminasi informasi: Melakukan diseminasi informasi penanaman modal kepada investor dan masyarakat luas melalui berbagai saluran	Peningkatan kerja sama: Meningkatkan kerja sama dengan lembaga terkait untuk meningkatkan ketersediaan informasi penanaman modal	
			Pengembangan platform online: Mengembangkan platform online untuk	Pengembangan kapasitas: Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia untuk	



NO	Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			memfasilitasi akses informasi penanaman modal dan interaksi antara investor dan pemerintah	meningkatkan kemampuan dalam mengelola informasi penanaman modal	

3.4 Manajemen Risiko

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang perlu menerapkan manajemen risiko sebagai pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta mengendalikan risiko-risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran strategis.

Manajemen risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang berfokus pada dua aspek utama yaitu **pelayanan perizinan dan non-perizinan** serta **peningkatan investasi daerah**. Risiko yang muncul dapat berdampak langsung pada pencapaian target RPJMD, seperti peningkatan iklim investasi, kemudahan berusaha, serta pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu dengan penerapan manajemen risiko yang terarah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang diharapkan mampu meminimalkan hambatan, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendukung terwujudnya visi Kabupaten Bengkayang 2025–2029: **“Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”**

Berdasarkan hasil identifikasi risiko, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang menghadapi beberapa tantangan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Risiko utama mencakup rendahnya realisasi investasi akibat minimnya promosi, infrastruktur terbatas, serta rendahnya minat investor. Selain itu, proses perizinan masih terhambat karena keterbatasan SDM dan belum optimalnya sistem OSS/MPP, yang berdampak pada menurunnya kepuasan masyarakat dan keengganan investor untuk berusaha di Bengkayang.

Risiko lain yang perlu diantisipasi adalah potensi maladministrasi layanan akibat regulasi yang rumit dan lemahnya pengawasan, serta lemahnya promosi potensi daerah sehingga peluang investasi kurang dikenal oleh investor. Di sisi lain, keterbatasan koordinasi lintas Perangkat Daerah juga dapat menghambat pelaksanaan proyek strategis daerah.

Untuk mengendalikan risiko tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang menetapkan langkah-langkah mitigasi berupa promosi investasi yang lebih proaktif, penguatan kapasitas SDM, penyederhanaan prosedur layanan, pengawasan internal, kerja sama dengan berbagai pihak, serta forum koordinasi lintas Perangkat Daerah guna mendorong sinergi pembangunan daerah.

Tabel 3.6 Matriks Risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang

Risiko	Potensi Sebab	Dampak	Kemungkinan	Level Dampak	Tingkat Risiko	Rencana Pengendalian
Rendahnya realisasi investasi	Kurangnya promosi, infrastruktur terbatas, rendahnya minat investor	Target investasi RPJMD tidak maksimal, daya saing daerah menurun	Sedang	Tinggi	Tinggi	Promosi investasi proaktif, penyediaan insentif, koordinasi lintas PD untuk infrastruktur
Terhambatnya proses perizinan	SDM terbatas, sistem OSS/MPP belum optimal	Kepuasan masyarakat menurun, investor enggan berusaha di Bengkayang	Sedang	Sedang	Sedang	Penguatan SDM, pelatihan, peningkatan layanan OSS, monitoring kinerja
Potensi maladministrasi layanan	Regulasi rumit, pengawasan lemah	Munculnya keluhan publik, menurunkan kepercayaan investor	Rendah-Sedang	Sedang	Sedang	Penyederhanaan prosedur, pengawasan internal, digitalisasi layanan
Lemahnya promosi potensi daerah	Minim promosi dan publikasi	Investor tidak mengetahui peluang usaha, potensi unggulan tidak berkembang	Sedang	Sedang	Sedang	Investment expo, kerja sama dengan BKPM dan dinas terkait, publikasi digital & media
Keterbatasan koordinasi lintas Perangkat Daerah	Tidak sinkronnya program dengan infrastruktur pendukung	Hambatan pada proyek investasi strategis	Rendah	Tinggi	Sedang	Forum koordinasi lintas Perangkat Daerah, integrasi perencanaan investasi & pembangunan daerah

Analisis Tambahan

1. **Risiko Tinggi** → fokus pada **realisasi investasi**, karena jika target investasi tidak tercapai maka berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan capaian RPJMD.
2. **Risiko Sedang** → mayoritas berkaitan dengan kualitas pelayanan perizinan (SDM, sistem digital, maladministrasi). Jika tidak dikelola, akan menurunkan kepuasan publik.



3. **Risiko Rendah** → relatif kecil, namun tetap perlu pengawasan, khususnya koordinasi antar-Perangkat Daerah agar mendukung investasi.



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah dijabarkan pada Bab III maka selanjutnya dapat ditentukan program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang sebagai langkah operasional yang dapat dilaksanakan mencapai tujuan strategi dalam kurun waktu lima tahun. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sementara, subkegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari kegiatan.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat teknik untuk merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan rencana strategi yang dapat dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang.

Kerangka perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang disusun secara sistematis dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) perangkat daerah serta sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang. Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang yang berfokus pada peningkatan pelayanan perizinan, penanaman modal, serta fasilitasi pengembangan usaha menjadi dasar dalam merumuskan tujuan strategis perangkat daerah.

Tujuan tersebut kemudian diarahkan pada pencapaian sasaran yang lebih spesifik yaitu mewujudkan iklim investasi yang kompetitif. Sasaran ini berfungsi sebagai jembatan antara tujuan strategis dengan outcome yang ingin dicapai.

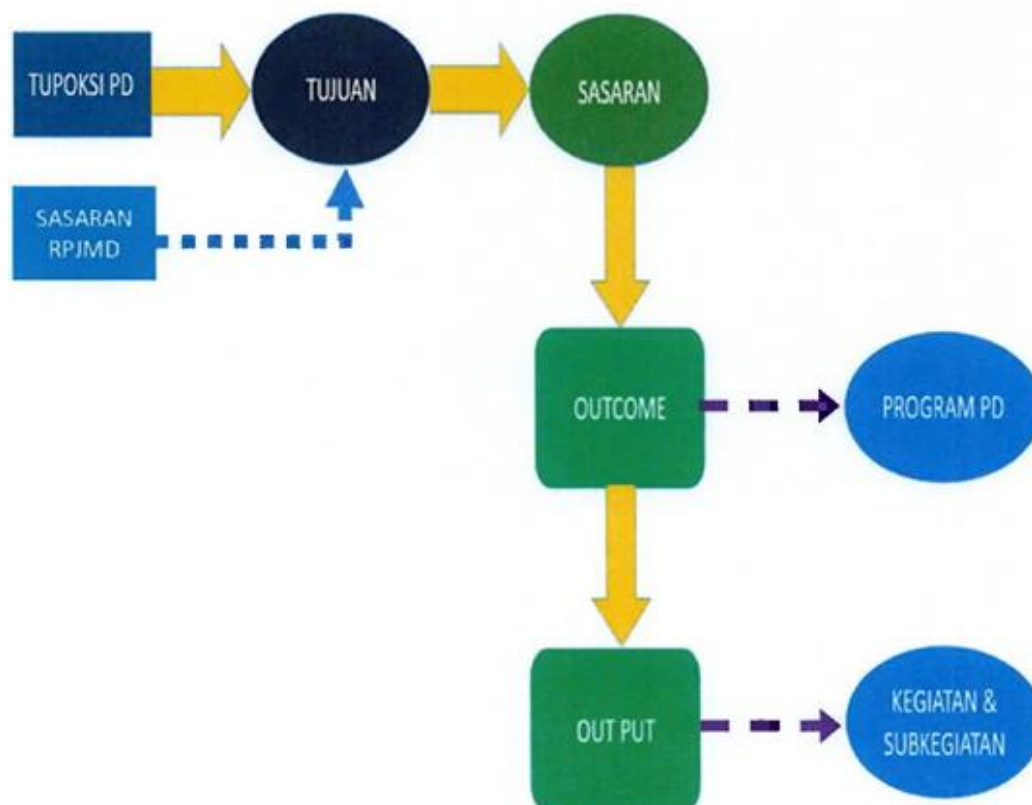
Outcome yang dituju meliputi meningkatnya kemudahan investasi, meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal, Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal serta Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal.

Outcome tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam program-program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang.

Selanjutnya, setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang lebih operasional, misalnya fasilitasi promosi investasi, penyusunan regulasi dan kebijakan perizinan yang lebih sederhana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, hingga penerapan sistem pelayanan berbasis digital. Dengan demikian, kerangka perumusan ini memastikan adanya kesinambungan antara sasaran RPJMD dengan outcome, output, hingga implementasi nyata di tingkat kegiatan.

Secara keseluruhan, kerangka ini menjadi panduan agar setiap langkah yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak langsung bagi peningkatan investasi, kemudahan berusaha, serta kesejahteraan masyarakat daerah.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra PD





Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)			
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
- Meningkatnya pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi Potensial Daerah - Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi Potensial Daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif				Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)					
					PMTB ADHB Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)					
		Meningkatnya Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Angka)			
							Persentase tingkat pemenuhan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah (%)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.18.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
		Optimalisasi Nilai Realisasi PMDN			Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (%)		
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi		Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
				Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
				Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
				Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
		Meningkatnya Rasio Daya serap Tenaga Kerja			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Nilai)		
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi		Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
				Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
				Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
				Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
		Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)			Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) (Perusahaan)		
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi		Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
				Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
				Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
				Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
		Meningkatnya Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)			Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) (Milyar Rupiah)		
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi		Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
				Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
				Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

Sumber: SIPD Renstra DPMPTSP 2025-2029



Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.702.316.712		4.816.601.462		4.908.975.484		5.003.540.116		5.100.360.417		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.952.316.712		4.036.601.462		4.097.775.484		4.159.892.116		4.222.966.498		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pemenuhan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah (%)	95	100	3.952.316.712	100	4.036.601.462	100	4.097.775.484	100	4.159.892.116	100	4.222.966.498	2.18.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000		30.450.000		30.906.750		31.370.353		31.840.906		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2.000.000	2	2.030.000	2	2.060.450	2	2.091.357	2	2.122.727		
2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.000.000		2.030.000		2.060.450		2.091.357		2.122.727		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2.000.000	2	2.030.000	2	2.060.450	2	2.091.357	2	2.122.727		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.000.000	1	2.030.000	1	2.060.450	1	2.091.357	1	2.122.727		
2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.000.000		2.030.000		2.060.450		2.091.357		2.122.727		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.000.000	1	2.030.000	1	2.060.450	1	2.091.357	1	2.122.727		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		1	2.000.000	1	2.030.000	1	2.060.450	1	2.091.357	1	2.122.727		
2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.000.000		2.030.000		2.060.450		2.091.357		2.122.727		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		1	2.000.000	1	2.030.000	1	2.060.450	1	2.091.357	1	2.122.727		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	2.000.000	2	2.030.000	2	2.060.450	2	2.091.357	2	2.122.727		
2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.000.000		2.030.000		2.060.450		2.091.357		2.122.727		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	2.000.000	2	2.030.000	2	2.060.450	2	2.091.357	2	2.122.727		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2.000.000	2	2.030.000	2	2.060.450	2	2.091.357	2	2.122.727		
2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.000.000		2.030.000		2.060.450		2.091.357		2.122.727		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2.000.000	2	2.030.000	2	2.060.450	2	2.091.357	2	2.122.727		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	20.000.000	3	20.300.000	3	20.604.500	3	20.913.568	3	21.227.271		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000		20.300.000		20.604.500		20.913.568		21.227.271		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	20.000.000	3	20.300.000	3	20.604.500	3	20.913.568	3	21.227.271		
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.349.356.712		3.424.597.062		3.476.591.018		3.529.389.880		3.583.006.727		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	3.000.000	1	3.045.000	1	3.090.675	1	3.137.035	1	3.184.091		
2.18.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3.000.000		3.045.000		3.090.675		3.137.035		3.184.091		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	3.000.000	1	3.045.000	1	3.090.675	1	3.137.035	1	3.184.091		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	3.000.000	1	3.045.000	1	3.090.675	1	3.137.035	1	3.184.091		
2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.000.000		3.045.000		3.090.675		3.137.035		3.184.091		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	3.000.000	1	3.045.000	1	3.090.675	1	3.137.035	1	3.184.091		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.150.000	1	10.302.250	1	10.456.784	1	10.613.636		
2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				10.000.000		10.150.000		10.302.250		10.456.784		10.613.636		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.150.000	1	10.302.250	1	10.456.784	1	10.613.636		
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	3.000.000	1	3.045.000	1	3.090.675	1	3.137.035	1	3.184.091		
2.18.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				3.000.000		3.045.000		3.090.675		3.137.035		3.184.091		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	3.000.000	1	3.045.000	1	3.090.675	1	3.137.035	1	3.184.091		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	128.040.000	1	129.960.600	1	131.910.009	1	133.888.659		135.896.989		
2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				128.040.000		129.960.600		131.910.009		133.888.659		135.896.989		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	128.040.000	1	129.960.600	1	131.910.009	1	133.888.659		135.896.989		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	37	3.202.316.712	39	3.275.351.462	41	3.325.106.734	43	3.375.633.332	45	3.426.943.829		
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.202.316.712		3.275.351.462		3.325.106.734		3.375.633.332		3.426.943.829		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	37	3.202.316.712	39	3.275.351.462	41	3.325.106.734	43	3.375.633.332	45	3.426.943.829		
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				20.000.000		20.300.000		20.604.500		20.913.568		21.227.272		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	5	10.000.000	5	10.150.000	5	10.302.250	5	10.456.784	5	10.613.636		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10.000.000		10.150.000		10.302.250		10.456.784		10.613.636		
Tertindakannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	5	10.000.000	5	10.150.000	5	10.302.250	5	10.456.784	5	10.613.636		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	37	10.000.000	37	10.150.000	37	10.302.250	37	10.456.784	37	10.613.636		
2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				10.000.000		10.150.000		10.302.250		10.456.784		10.613.636		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	37	10.000.000	37	10.150.000	37	10.302.250	37	10.456.784	37	10.613.636		
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				164.640.000		167.109.600		169.616.244		172.160.488		174.742.896		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	5	9.640.000	5	9.784.600	5	9.931.369	5	10.080.340	5	10.231.545		
2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				9.640.000		9.784.600		9.931.369		10.080.340		10.231.545		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	5	9.640.000	5	9.784.600	5	9.931.369	5	10.080.340	5	10.231.545		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	205	40.000.000	205	40.600.000	205	41.209.000	205	41.827.135	205	42.454.542		
2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000		40.600.000		41.209.000		41.827.135		42.454.542		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	205	40.000.000	205	40.600.000	205	41.209.000	205	41.827.135	205	42.454.542		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	6.500	25.000.000	6.500	25.375.000	6.500	25.755.625	6.500	26.141.959	6.500	26.534.089		
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25.000.000		25.375.000		25.755.625		26.141.959		26.534.089		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	6.500	25.000.000	6.500	25.375.000	6.500	25.755.625	6.500	26.141.959	6.500	26.534.089		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	10	10.000.000	10	10.150.000	10	10.302.250	10	10.456.784	10	10.613.636		
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.150.000		10.302.250		10.456.784		10.613.636		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	10	10.000.000	10	10.150.000	10	10.302.250	10	10.456.784	10	10.613.636		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	44	40.000.000	44	40.600.000	44	41.209.000	44	41.827.135	44	42.454.542		
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		40.600.000		41.209.000		41.827.135		42.454.542		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	44	40.000.000	44	40.600.000	44	41.209.000	44	41.827.135	44	42.454.542		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	24	40.000.000	24	40.600.000	24	41.209.000	24	41.827.135	24	42.454.542		
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		40.600.000		41.209.000		41.827.135		42.454.542		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	24	40.000.000	24	40.600.000	24	41.209.000	24	41.827.135	24	42.454.542		
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				65.000.000		65.975.000		66.964.625		67.969.094		68.988.631		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	3	30.000.000	3	30.450.000	3	30.906.750	3	31.370.351	3	31.840.907		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		30.450.000		30.906.750		31.370.351		31.840.907		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	3	30.000.000	3	30.450.000	3	30.906.750	3	31.370.351	3	31.840.907		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	12	35.000.000	12	35.525.000	12	36.057.875	12	36.598.743	12	37.147.724		
2.18.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		35.525.000		36.057.875		36.598.743		37.147.724		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	12	35.000.000	12	35.525.000	12	36.057.875	12	36.598.743	12	37.147.724		
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				233.320.000		236.819.800		240.372.097		243.977.679		247.637.345		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		208.320.000	12	211.444.800	12	214.616.472	12	217.835.719	12	221.103.255		
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				208.320.000		211.444.800		214.616.472		217.835.719		221.103.255		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		208.320.000	12	211.444.800	12	214.616.472	12	217.835.719	12	221.103.255		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	12	12.000.000	12	12.180.000	12	12.362.700	12	12.548.141	12	12.736.363		
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12.000.000		12.180.000		12.362.700		12.548.141		12.736.363		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	12	12.000.000	12	12.180.000	12	12.362.700	12	12.548.141	12	12.736.363		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	20	10.000.000	20	10.150.000	20	10.302.250	20	10.456.784	20	10.613.636		
2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.150.000		10.302.250		10.456.784		10.613.636		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	20	10.000.000	20	10.150.000	20	10.302.250	20	10.456.784	20	10.613.636		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	350	3.000.000	350	3.045.000	350	3.090.675	350	3.137.035	350	3.184.091		
2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.045.000		3.090.675		3.137.035		3.184.091		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	350	3.000.000	350	3.045.000	350	3.090.675	350	3.137.035	350	3.184.091		
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80.000.000		81.200.000		82.418.000		83.654.270		84.909.085		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	95	10	10.000.000	10	10.150.000	10	10.302.250	10	10.456.784	10	10.613.636		
2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.150.000		10.302.250		10.456.784		10.613.636		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	95	10	10.000.000	10	10.150.000	10	10.302.250	10	10.456.784	10	10.613.636		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	25.000.000	3	25.375.000	3	25.755.625	3	26.141.959	3	26.534.089		
2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		25.375.000		25.755.625		26.141.959		26.534.089		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	25.000.000	3	25.375.000	3	25.755.625	3	26.141.959	3	26.534.089		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		1	20.000.000	12	20.300.000	12	20.604.500	12	20.913.568	12	21.227.271		
2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.000.000		20.300.000		20.604.500		20.913.568		21.227.271		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		1	20.000.000	12	20.300.000	12	20.604.500	12	20.913.568	12	21.227.271		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	12	25.000.000	12	25.375.000	12	25.755.625	12	26.141.959	12	26.534.089		
2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		25.375.000		25.755.625		26.141.959		26.534.089		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	12	25.000.000	12	25.375.000	12	25.755.625	12	26.141.959	12	26.534.089		
2.18.01.2.13 - Penataan Organisasi				10.000.000		10.150.000		10.302.250		10.456.784		10.613.636		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	4	10.000.000	4	10.150.000	4	10.302.250	4	10.456.784	4	10.613.636		
2.18.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				10.000.000		10.150.000		10.302.250		10.456.784		10.613.636		
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	4	10.000.000	4	10.150.000	4	10.302.250	4	10.456.784	4	10.613.636		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				240.000.000		249.600.000		259.584.000		269.967.360		280.766.054		
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	3	3,09	240.000.000	5	249.600.000	5	259.584.000	5	269.967.360	5	280.766.054	2.18.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				80.000.000		83.200.000		86.528.000		89.989.120		93.588.685		
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	1	1	40.000.000	1	41.600.000	1	43.264.000	1	44.994.560	1	46.794.342		
2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota				40.000.000		41.600.000		43.264.000		44.994.560		46.794.342		
Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	1	1	40.000.000	1	41.600.000	1	43.264.000	1	44.994.560	1	46.794.342		
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	1	30.000.000	1	31.200.000	1	32.448.000	1	33.745.920	1	35.095.757		
2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				30.000.000		31.200.000		32.448.000		33.745.920		35.095.757		
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	1	30.000.000	1	31.200.000	1	32.448.000	1	33.745.920	1	35.095.757		
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2	1	10.000.000	1	10.400.000	1	10.816.000	1	11.248.640	1	11.698.586		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				10.000.000		10.400.000		10.816.000		11.248.640		11.698.586		
Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2	1	10.000.000	1	10.400.000	1	10.816.000	1	11.248.640	1	11.698.586		
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				160.000.000		166.400.000		173.056.000		179.978.240		187.177.369		
Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	1	1	40.000.000	1	41.600.000	1	43.264.000	1	44.994.560	1	46.794.342		
2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)				40.000.000		41.600.000		43.264.000		44.994.560		46.794.342		
Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	1	1	40.000.000	1	41.600.000	1	43.264.000	1	44.994.560	1	46.794.342		
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	120.000.000	1	104.000.000	1	108.160.000	1	112.486.400	1	116.985.856		
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				120.000.000		104.000.000		108.160.000		112.486.400		116.985.856		
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	120.000.000	1	104.000.000	1	108.160.000	1	112.486.400	1	116.985.856		
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	0	1	20.800.000	1	21.632.000	1	22.497.280	1	23.397.171		
2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				0		20.800.000		21.632.000		22.497.280		23.397.171		
Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	0	1	20.800.000	1	21.632.000	1	22.497.280	1	23.397.171		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				60.000.000		62.400.000		64.896.000		67.491.840		70.191.513		
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	75	76	60.000.000	77	62.400.000	78	64.896.000	79	67.491.840	80	70.191.513	2.18.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000		62.400.000		64.896.000		67.491.840		70.191.513		
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	30.000.000	1	31.200.000	1	32.448.000	1	33.745.920	1	35.095.756,5		
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000		31.200.000		32.448.000		33.745.920		35.095.756,5		
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	30.000.000	1	31.200.000	1	32.448.000	1	33.745.920	1	35.095.756,5		
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	1	1	30.000.000	1	31.200.000	1	32.448.000	1	33.745.920	1	35.095.756,5		
2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000		31.200.000		32.448.000		33.745.920		35.095.756,5		
Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	1	1	30.000.000	1	31.200.000	1	32.448.000	1	33.745.920	1	35.095.756,5		
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				300.000.000		312.000.000		324.480.000		337.459.200		350.957.568		
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	85	86	300.000.000	87	312.000.000	88	324.480.000	89	337.459.200	90	350.957.568	2.18.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				300.000.000		312.000.000		324.480.000		337.459.200		350.957.568		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	52.000.000	1	54.080.000	1	56.243.200	1	58.492.928		
2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				50.000.000		52.000.000		54.080.000		56.243.200		58.492.928		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	52.000.000	1	54.080.000	1	56.243.200	1	58.492.928		
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	500	900	50.000.000	1.100	52.000.000	1.300	54.080.000	1.500	56.243.200	1.700	58.492.928		
2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				50.000.000		52.000.000		54.080.000		56.243.200		58.492.928		
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	500	900	50.000.000	1.100	52.000.000	1.300	54.080.000	1.500	56.243.200	1.700	58.492.928		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)		120	50.000.000	120	52.000.000	120	54.080.000	120	56.243.200	120	58.492.928		
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				50.000.000		52.000.000		54.080.000		56.243.200		58.492.928		
Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)		120	50.000.000	120	52.000.000	120	54.080.000	120	56.243.200	120	58.492.928		
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	500	900	150.000.000	1.100	156.000.000	1.300	162.240.000	1.500	168.729.600	1.700	175.478.784		
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				150.000.000		156.000.000		162.240.000		168.729.600		175.478.784		
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	500	900	150.000.000	1.100	156.000.000	1.300	162.240.000	1.500	168.729.600	1.700	175.478.784		
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				100.000.000		104.000.000		108.160.000		112.486.400		116.985.856		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	72,37	73	100.000.000	74	104.000.000	75	108.160.000	76	112.486.400	77	116.985.856	2.18.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		104.000.000		108.160.000		112.486.400		116.985.856		
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	50	50	55.000.000	50	57.200.000	50	59.488.000	50	61.867.520	50	64.342.221		
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				55.000.000		57.200.000		59.488.000		61.867.520		64.342.221		
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	50	50	55.000.000	50	57.200.000	50	59.488.000	50	61.867.520	50	64.342.221		
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	10	10	25.000.000	10	26.000.000	10	27.040.000	10	28.121.600	10	29.246.464		
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal				25.000.000		26.000.000		27.040.000		28.121.600		29.246.464		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	10	10	25.000.000	10	26.000.000	10	27.040.000	10	28.121.600	10	29.246.464		
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	5	5	20.000.000	5	20.800.000	5	21.632.000	5	22.497.280	5	23.397.171		
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				20.000.000		20.800.000		21.632.000		22.497.280		23.397.171		
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	5	5	20.000.000	5	20.800.000	5	21.632.000	5	22.497.280	5	23.397.171		
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				50.000.000		52.000.000		54.080.000		56.243.200		58.492.928		
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	85	86	50.000.000	87	52.000.000	88	54.080.000	89	56.243.200	90	58.492.928	2.18.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		52.000.000		54.080.000		56.243.200		58.492.928		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	4	4	50.000.000	4	52.000.000	4	54.080.000	4	56.243.200	4	58.492.928		
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				50.000.000		52.000.000		54.080.000		56.243.200		58.492.928		
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	4	4	50.000.000	4	52.000.000	4	54.080.000	4	56.243.200	4	58.492.928		

Sumber: SIPD Renstra DPMPTSP 2025-2029



Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
1.	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			2.18.02.2.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
			2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
			2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
2.	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
3.	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
			2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
4.	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalnya Pelaksanaan Penanaman Modal	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
			2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
5.	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

Sumber: SIPD Renstra DPMPTSP 2025-2029

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA			TARGET TAHUN						KETERANGAN
				TARGET 2024	CAPAIAN 2024	PERSENTASE CAPAIAN (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU												
2	PMTB ADHB Lapangan Usaha	Milyar Rupiah	0	0	0	0	4.175,12	4.479,32	4.728,69	5.043,71	5.341,29	5.678,12	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	65	65	65,1	100,15	65,25	65,5	65,75	66	67	68	

Sumber: SIPD Renstra DPMPTSP 2025-2029

Indikator **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Lapangan Usaha** diperoleh dari hasil rilis **Kabupaten Bengkayang Dalam Angka (KDA)** yang diterbitkan oleh BPS. Data ini menjadi acuan penting untuk menilai perkembangan investasi riil yang masuk ke wilayah Kabupaten Bengkayang, khususnya terkait pembentukan aset tetap seperti bangunan, peralatan, mesin, dan sarana produksi lainnya.

Target PMTB tahun 2025 ditetapkan sebesar **Rp 4.175,12 miliar** dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai **Rp 5.678,12 miliar pada tahun 2030**. Tren kenaikan ini mencerminkan optimisme terhadap pertumbuhan investasi di Kabupaten Bengkayang yang sejalan dengan arah pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan nilai PMTB diharapkan mendorong pertumbuhan sektor usaha, penciptaan lapangan kerja baru, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Bengkayang ditetapkan dengan baseline **65** pada tahun 2024. Target mengalami kenaikan bertahap dari **65,25 pada tahun 2025** hingga mencapai **68 pada tahun 2030**. Peningkatan nilai SAKIP menunjukkan

adanya komitmen terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Meskipun kenaikan target relatif moderat, hal ini sejalan dengan prinsip perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Bengkayang telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang mengacu pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah pada RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA			TARGET TAHUN						KET.
					TARGET 2024	CAPAIAN 2024	PERSENTASE CAPAIAN (%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
2	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	kumulatif	Milyar Rupiah	792,36	3975,45	792,36	19,93	713,05	735,11	771,82	810,46	850,98	893,53	
3	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	kumulatif	%	0	0	0	0	3	3,09	5	5	5	5	
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	kumulatif	Angka	65	65	65,1	100,15	65,25	65,5	65,75	66	67	68	
5	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	kumulatif	Perusahaan	0	0	0	0	98	103	108	113	119	125	
6	PMTB ADHB Lapangan Usaha	kumulatif	Milyar Rupiah	0	0	0	0	4175,12	4479,32	4728,69	5043,71	5341,29	5678,12	
7	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	kumulatif	Nilai	0	0	0	0	65,8	69,09	72,54	76,17	79,98	83,98	
8	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	kumulatif	Nilai	85,56	85,5	85,56	100,07	85,55	85,75	86	87	88	89	

Sumber: SIPD Renstra DPMPPTSP 2025-2029

Analisis Indikator Kinerja Kunci:

1. Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)

Target tahun 2025 ditetapkan lebih rendah dibanding capaian 2024. Hal ini didasarkan pada tren tiga tahun terakhir yang menunjukkan penurunan realisasi investasi. Dengan menggunakan rumus tren tiga tahun terakhir dibagi rata-rata, diperoleh target investasi tahun 2025 sebesar Rp 713,05 miliar. Penetapan target ini juga telah melalui analisis dan dikonfirmasi dengan BAPPERIDA sehingga lebih realistis dan terukur. Walaupun targetnya lebih rendah, arah kebijakan tetap difokuskan pada



upaya menjaga stabilitas iklim investasi serta meningkatkan daya saing daerah.

2. **Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN**

Indikator ini menggunakan satuan persentase (%). Data capaian target ditetapkan secara bertahap mulai 3% di tahun 2025, meningkat menjadi 5% pada 2027 hingga 2030. Strategi ini dipilih agar pertumbuhan investasi domestik tetap dijaga secara konsisten, meskipun kondisi ekonomi makro maupun dinamika pasar dapat berfluktuasi. Penentuan target yang moderat bertujuan agar capaian indikator ini realistis dan dapat dimonitor secara terukur.

3. **Nilai AKIP Perangkat Daerah**

Pada tahun 2024 nilai AKIP tercatat 65,25. Target tahun 2025 diproyeksikan naik menjadi 65,5, dan secara bertahap meningkat hingga 68 pada tahun 2029. Peningkatan yang relatif kecil namun konsisten ini menunjukkan adanya perbaikan tata kelola, perencanaan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Kenaikan bertahap mencerminkan upaya penguatan kapasitas birokrasi dan konsistensi implementasi sistem akuntabilitas kinerja.

4. **Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)**

Pada tahun 2024 terdapat 94 perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Bengkayang. Target tahun 2025 ditetapkan naik menjadi 98 perusahaan, dengan tren peningkatan bertahap hingga 119 perusahaan pada tahun 2029. Target ini realistis melihat adanya peluang investasi yang masih terbuka di sektor-sektor unggulan daerah. Kenaikan jumlah investor diharapkan dapat memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

5. **PMTB & DHPB Lapangan Usaha**

Target tahun 2025 ditetapkan Rp 4.175,42 miliar, lalu meningkat secara bertahap menjadi Rp 5.678,12 miliar pada tahun 2030. Pola kenaikan target menunjukkan adanya proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Penetapan target tanpa baseline ini didasarkan pada pendekatan proyeksi ekonomi makro daerah serta potensi sektor unggulan. Strategi bertahap dipilih agar target lebih realistis dan selaras dengan kapasitas ekonomi daerah.

6. **Rasio Daya Serap Tenaga Kerja**

Target yang ditetapkan 65,8 pada tahun 2025 dan meningkat hingga 83,98 di tahun 2029. Target ini menggambarkan komitmen peningkatan serapan tenaga kerja seiring bertambahnya jumlah investasi. Kenaikan yang cukup signifikan menunjukkan fokus pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kontribusi investasi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran.



7. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Tahun 2024 indeks kepuasan mencapai 85,56 dengan persentase capaian 100,07%. Target 2025 ditetapkan pada angka yang sama, yakni 85,55, untuk menjaga konsistensi. Selanjutnya, target meningkat secara bertahap hingga 89 pada tahun 2029. Peningkatan kecil namun berkelanjutan ini menunjukkan upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan tetap menjaga stabilitas kepuasan masyarakat di level tinggi.

Analisis indikator kinerja kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang menunjukkan bahwa sebagian besar target ditetapkan secara realistis dengan memperhatikan tren capaian sebelumnya, dinamika ekonomi, serta hasil diskusi dengan pihak terkait. Semua indikator diharapkan naik secara konsisten, mencerminkan orientasi pembangunan daerah yang berfokus pada perbaikan tata kelola, peningkatan investasi, serta pelayanan publik yang lebih baik.

BAB V **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkayang .

Bengkayang, 27 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG**

DODY WALUYO, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19790430 199712 1 001



DPMP TSP

KABUPATEN BENGKAYANG